



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI



2022

LAPORAN HASIL SURVEI
KEPUASAN UNIT KERJA TERHADAP PELAKSANAAN
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2022

ST NOMOR: 072/PI.05.05/III/2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Survei	2
BAB II METODE SURVEI	3
A. Waktu dan Sasaran Survei	3
B. Instrumen / Isian Kuesioner	3
C. Cara Penghitungan	3
BAB III PENILAIAN SURVEI.....	4
BAB IV HASIL SURVEI DAN ANALISIS DATA	5
A. Bagian 1: Kurun Waktu Pemeriksaan.....	5
B. Bagian 2: Independensi APIP	6
C. Bagian 3: Integritas dan Profesionalisme APIP	7
D. Bagian 4: Penugasan Consulting APIP	8
E. Komentar dan Saran	9
F. Kesimpulan.....	9
BAB V PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan survei kepuasan pengguna layanan terhadap pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan untuk mendapatkan saran serta masukan konstruktif bagi pembinaan dan peningkatan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Survei dilakukan di 7 (tujuh) unit kerja yakni Biro Kesekretariatan Pimpinan, Pusat Kajian Anggaran, Biro Kerja Sama AntarParlemen, Biro Persidangan II, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode deskriptif karena menggambarkan kejadian atau situasi yang dikaji. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 17 pertanyaan dan 1 esai untuk komentar atau saran yang ingin disampaikan unit kerja kepada Inspektorat Utama. Adapun pertanyaan di dalam kuesioner dibuat sederhana, singkat, dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh responden.

Tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan Inspektorat Utama penting untuk diketahui oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai upaya untuk mengidentifikasi kelemahan di setiap dimensi dan memperbaiki kinerja pelaksanaan pengawasan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan kurun waktu pemeriksaan, independensi APIP, integritas dan profesionalisme APIP, dan penugasan *consulting* APIP.

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugasnya.

B. Dasar Pelaksanaan

Adapun landasan hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Surat Tugas Inspektorat Utama Nomor 072/PI.05.05/III/2022 Tanggal 1 April 2022 tentang Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tujuan dan Manfaat Survei

1. Tujuan Survei

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil penilaian dan pendapat unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Untuk memperoleh fakta tentang kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI serta pendapat atau saran dari unit kerja sebagai upaya dalam peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

2. Manfaat Survei

Manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ini adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para auditor dan unsur pimpinan dalam peningkatan kualitas kinerja Inspektorat Utama serta peningkatan sinergitas dan harmonisasi dengan unit kerja dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB II

METODE SURVEI

A. Waktu dan Sasaran Survei

Kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai dari tanggal 29 Maret 2022 - 7 April 2022 dengan sasaran survei dilakukan pada 27 responden yang terdiri dari 7 (tujuh) unit kerja yakni Biro Kesekretariatan Pimpinan, Pusat Kajian Anggaran, Biro Kerja Sama Antar Parlemen, Biro Persidangan II, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

B. Instrumen / Isian Kuesioner

Instrumen yang digunakan dalam melakukan kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ini adalah dengan menggunakan kuesioner metode tertutup dimana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban. Data hasil survei yang diperoleh berupa data kualitatif dan data tersebut dikonversi ke dalam bentuk data kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik.

C. Cara Penghitungan

Secara umum, teknik penghitungan dalam kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ini menggunakan skala *Guttman* dimana skala ini banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Skala *Guttman* adalah skala pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas dari responden dengan jawaban "YA" atau "TIDAK" terkait dengan permasalahan yang ditanyakan dalam kuesioner. Untuk jawaban yang mendukung atau positif ("YA") mendapat skor 1 sedangkan untuk jawaban yang tidak mendukung atau negatif ("TIDAK") mendapat skor 0.

Hasil survei ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III PENILAIAN SURVEI

Dari data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan untuk menghasilkan total skor. Berikut tabel bobot nilai dan tabel persentase nilai:

Tabel Bobot Nilai

YA	1
TIDAK	0

Tabel Persentase Nilai

Jawaban	Keterangan
0% - 19,99%	E
20% - 39,99%	D
40% - 59,99%	C
60% - 79,99%	B
80% - 100%	A

Sedangkan untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui terlebih dahulu total skor dan jumlah pertanyaan untuk item penilaian. Interpretasi responden dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus = Total skor / Jumlah pertanyaan x 100

**BAB IV
HASIL SURVEI DAN ANALISIS DATA**

Berikut penghitungan hasil kegiatan survei kepuasan unit kerja terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

A. Bagian 1: Kurun Waktu Pemeriksaan

No.	Pernyataan	Frekuensi		Penilaian	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kurun Waktu Pemeriksaan					
1.	Surat pemberitahuan diberikan sebelum pelaksanaan pengawasan	24	3	88,9	11,1
2.	Waktu pelaksanaan pengawasan sesuai dengan surat pemberitahuan	24	3	88,9	11,1
Jumlah				88,9%	
Predikat				A	

Sebanyak 88,9% dari total responden menyatakan bahwa kegiatan pengawasan terencana dan tepat waktu.

B. Bagian 2: Independensi APIP

No.	Pernyataan	Frekuensi		Penilaian	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Independensi APIP					
1	Bersikap dan berperilaku etis terhadap unit kerja (sikap, perkataan, maupun tindakan)	26	1	96,3	3,7
2	Pengawasan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain (<i>conflict of interest</i>)	27	0	100	0
3	Tidak meminta hadiah atau imbalan dari unit kerja dalam pelaksanaan pengawasan	27	0	100	0
4	Tidak menerima hadiah atau imbalan dari unit kerja dalam pelaksanaan pengawasan	27	0	100	0
Jumlah				99,07%	
Predikat				A	

Sebanyak 99,07% dari total responden menyatakan Aparat Pengawas Internal menunjukkan perilaku sesuai dengan 4 *item* pertanyaan pada Tabel Bagian 2.

C. Bagian 3: Integritas dan Profesionalisme APIP

No.	Pernyataan	Frekuensi		Penilaian	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Integritas dan Profesionalisme APIP					
1	Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan	26	1	96,3	3,7
2	Dilengkapi dengan prasarana (anggaran, peralatan, dan lain-lain) yang cukup dalam menjalankan penugasannya sehingga tidak membebani unit kerja	26	1	96,3	3,7
3	Bersikap jujur dan tetap menjaga kerahasiaan data informasi unit kerja	27	0	100	0
4	Taat pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan penugasannya	27	0	100	0
5	Mendokumentasikan dengan baik tindak lanjut hasil pengawasan	25	2	92,6	7,4
Jumlah				97,04	
Predikat				A	

Sebanyak 97,04% dari total responden menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal tegas dalam penilaian, dilengkapi dengan prasarana yang cukup, menjaga kerahasiaan data, taat terhadap peraturan, serta mendokumentasikan TLHP dengan baik ketika melaksanakan tugas.

D. Bagian 4: Penugasan Consulting APIP

No.	Pernyataan	Frekuensi		Penilaian	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Penugasan Consulting APIP					
1	Consulting dapat diakses secara mudah oleh unit kerja	24	3	88,9	11,1
2	Bersikap sebagai konsultan (melakukan pembinaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan memberikan arahan) terhadap peningkatan pencapaian tujuan unit kerja	27	0	100	0
3	Mampu memberikan arahan atas permasalahan unit kerja dengan cepat, tepat, dan akurat	27	0	100	0
4	Memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi unit kerja terkait dengan penugasan	26	1	96,3	3,7
5	Dapat memberikan rasa nyaman dalam bermitra dengan unit kerja	27	0	100	0
6	Menanggapi dengan cepat (kurang dari 14 hari) permintaan penugasan yang dikirimkan oleh unit kerja	26	1	96,3	3,7
Jumlah				96,92	
Predikat				A	

Sebanyak 96,92% dari total responden menyatakan Aparat Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas pengawasannya mampu memberikan arahan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja dan unit kerja merasa bisa mengakses dengan mudah dalam hal konsultasi dengan pihak APIP sesuai dengan 6 item pertanyaan pada Tabel Bagian 4.

Berdasarkan hasil secara keseluruhan *item* pertanyaan di atas diperoleh tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar 95,48% dengan predikat "A".

E. Komentar dan Saran

1. Perlu penambahan jumlah auditor ketika penugasan dalam pendampingan di masing-masing unit kerja.
2. Terus ditingkatkan keaktifannya dalam memberikan pendampingan dalam upaya peningkatan pengawasan di unit-unit kerja.
3. Semoga kinerja Inspektorat Utama ke depannya semakin lebih baik.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari tindak lanjut pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkala.
5. Lebih banyak melakukan sosialisasi dalam kegiatan pengawasan di lingkungan Setjen DPR RI.
6. Cukup baik.
7. Pertahankan dan tingkatkan kinerja.
8. Lebih ditingkatkan ketelitian dalam melakukan pengawasan sehingga tidak menjadi temuan di akhir pelaksanaan pengawasan.
9. Berhubung banyaknya pegawai-pegawai yang menangani masalah anggaran pada unit kerja yang sudah pensiun dan penggantinya belum memahami semua penggunaan anggaran, alangkah baiknya Inspektorat Utama dapat mendampingi untuk pembuatan RAK unit kerja.
10. Lebih ditingkatkan baik pelaksanaan pengawasan maupun kompetensi auditornya.
11. Semoga ke depan lebih baik lagi
12. Sudah baik.
13. Jika ada indikasi temuan sebaiknya lebih cepat diberitahukan agar tidak salah langkah atau bisa segera diperbaiki.
14. Lebih ditingkatkan lagi kerja sama dan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
15. Tingkatkan lagi pengawasannya.

F. Kesimpulan

1. Secara umum kualitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPRRI dinilai baik oleh unit kerja. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan unit kerja secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang diperoleh yakni sebesar 95.48%.

2. Dari keempat unsur penilaian, unsur yang mendapat penilaian tertinggi dari responden adalah Independensi APIP. Sedangkan unsur yang mendapat penilaian terendah adalah Kurun Waktu Pemeriksaan. Berikut merupakan rincian dari hasil penilaian survei.
 - Masih ada sebanyak 11,1% dari total responden menyatakan bahwa surat pemberitahuan tidak diberikan sebelum pelaksanaan pengawasan.
 - Masih ada sebanyak 11,1% dari total responden menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan.
 - Masih ada sebanyak 3,7% dari total responden menyatakan bahwa Auditor tidak bersikap dan berperilaku etis terhadap unit kerja.
 - Masih ada sebanyak 3,7% dari total responden menyatakan bahwa Auditor tidak bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - Masih ada sebanyak 3,7% dari total responden menyatakan bahwa Auditor tidak dilengkapi dengan prasarana (anggaran, peralatan, dan lain-lain) yang cukup dalam menjalankan penugasannya.
 - Masih ada sebanyak 7,4% dari total responden menyatakan bahwa Auditor belum mendokumentasikan dengan baik tindak lanjut hasil pengawasan.
 - Masih ada sebanyak 11,1% dari total responden menyatakan masih kesulitan dalam mengakses *Consulting*.
 - Masih ada sebanyak 3,7% dari total responden menyatakan bahwa Auditor tidak memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi unit kerja terkait dengan penugasan.
 - Masih ada sebanyak 3,7% dari total responden menyatakan bahwa Auditor tidak menanggapi dengan cepat (kurang dari 14 hari) permintaan penugasan yang dikirimkan oleh unit kerja.
3. Beberapa masukan dari unit kerja yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan kepada unit-unit kerja terkait pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan perlu lebih ditingkatkan sehingga informasi tentang pengawasan dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada unit kerja.
 - Kegiatan monitoring dan evaluasi dari tindak lanjut pengawasan akan dilakukan secara berkala.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Jakarta, 8 April 2022
Kepala Bagian Administrasi
Inspektorat Utama,



Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B.
NIP. 197401251993022001

